ANALISIS PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DALAM PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS

Detty Adithya Ayunda Putri Tandjung[1], Delfira Rahmatia Utami[2], Novia Nurul Hidayanti[3], Muhammad Hafiz[4], Rudy Kurniawan[5]
[1]Sosiologi FISP Universitas Sriwijaya
[2]Sosiologi FISP Universitas Sriwijaya
[3]Sosiologi FISP Universitas Sriwijaya
[4]Sosiologi FISP Universitas Sriwijaya
[5]Sosiologi FISP Universitas Sriwijaya
[1]dettyadithya1@gmail.com, [2]delfiradelfi71@gmail.com,
[3]novia.nurul.hidayanti11@gmail.com, [4]muhh26290@gmail.com,
[5]rudykurniawan@fisip.unsri.ac.id,

ABSTRACT

This study aims to analyze the Equivalency Education Program within Community Learning Activity Centers (PKBM - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) through the perspective of Talcott Parsons' Structural Functionalism Theory. Employing a descriptive qualitative research method with a literature review data collection technique, this study examines data from various relevant sources since 2020. The results of the analysis indicate that PKBMs function as a crucial subsystem in maintaining the equilibrium of the social system, particularly in addressing issues of school dropouts and disparities in educational access. The Equivalency Programs (Package A, B, and C) within PKBMs fulfill the four functional imperatives within Parsons' AGIL framework (Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency). Adaptation is realized through adjustments to fill educational access gaps for vulnerable populations and empower uncertified human resources. Goal Attainment is achieved by reducing the dropout rate and providing inclusive non-formal education services. Integration functions as an instrument for unifying marginalized groups through the recognition of equivalency certificates and the strengthening of social solidarity. Meanwhile, Latency seeks to maintain system stability by revitalizing the spirit of learning and reproducing socio-cultural values. The total number of PKBM equivalency education institutions in Indonesia is 25,795.

Keywords: Equivalency Education; Community Learning Activity Centers; AGIL.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis program Pendidikan Kesetaraan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi literatur, penelitian ini mengkaji data dari berbagai sumber relevan sejak tahun 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa PKBM berfungsi sebagai subsistem penting dalam menjaga keseimbangan sistem sosial, khususnya dalam mengatasi masalah putus sekolah dan disparitas akses pendidikan. Program Kesetaraan (Paket A, B, dan C) pada PKBM menjalankan empat imperatif fungsional dalam kerangka AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency) Parsons. Adaptation terwujud melalui penyesuaian untuk mengisi celah akses pendidikan bagi populasi rentan dan memberdayakan sumber daya manusia yang belum tersertifikasi. Goal Attainment dicapai melalui penurunan angka putus sekolah dan penyediaan layanan pendidikan nonformal yang inklusif. Integration berfungsi sebagai instrumen pemersatu kelompok termarjinalkan melalui pengakuan ijazah kesetaraan dan penguatan solidaritas sosial. Sementara itu, Latency berupaya memelihara stabilitas sistem melalui revitalisasi semangat belajar dan reproduksi nilai-nilai sosial budaya. Total sekolah pendidikan kesetaraan PKBM di Indonesia berjumlah 25.795.

Kata kunci: Pendidikan Kesetaraan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, AGIL

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan yang fundamental bagi setiap manusia diberbagai belahan dunia. Di Indonesia untuk memperoleh Pendidikan telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 (1), yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan Pendidikan”. Melalui Pendidikan, setiap bangsa berupaya mencerdaskan masyarakatnya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, sehingga memberikan dampak positif terhadap aspek kehidupan masyarakat serta dapat meningkat kesejahteraan Masyarakat. (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, 2020)

Saat ini di Indonesia menghadapi persoalan di bidang Pendidikan, salah satunya yaitu tingginya angka putus sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan Sebagian Masyarakat tidak dapat menyelesaikan pendidikannya secara tuntas. Di sisi ain, tuntutan dunia kerja yang semakin tinggi dan persaingan yang ketat menuntut setiap individu untuk memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan rendah, karena

keterbatasan tersebut dapat membatasi peluang mereka dalam memperoleh pekerjaan yang layak maupun meningkatkan taraf hidupnya.

Berdasarkan UU No 23 pasal 26 (1) menyatakan bahwa bahwa pendidika non formal diselenggarakan bagi warga Masyarakat yang memerlukan layanan Pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan formal dalam rangka mendukung Pendidikan sepanjang hayat. Di Indonesia ada 2 jenis Pendidikan yaitu Pendidikan formal dan nonformal. Adapun pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA maupun Pendidikan tinggi. Sedangkan untuk satuan Pendidikan nonformal seperti Lembaga kursus, Lembaga pelatihan, majelis taklim, maupun pusat

Kegiatan belajar Masyarakat. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003) Keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, sangat membantu Masyarakat yang putus sekolah dan tidak memiliki kesempatan mengikuti pendiidkan formal. PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) menjadi alternatif jalur pendidikan nonformal yang bertujuan memberikan kesempatan belajar setara dengan jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, hingga menengah atas melalui program Paket A, B, dan C. Melalui lembaga ini, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta ijazah yang diakui secara resmi oleh negara, sehingga membuka peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja. Selain itu, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) juga berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan demikian, keberadaan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) berkontribusi besar dalam mendukung pemerataan akses pendidikan dan pengentasan masalah putus sekolah di berbagai daerah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi literatur. (Sarwono, 2006) menyatakan bahwa studi literatur yaitu pengkajian data dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari masalah yang di akan teliti. Study literatur disebut sebagai penelitian perpustakaan atau penelitian pustaka. Keterbatasan kegiatan ini

hanya mengarah pada produksi artikel, jurnal dan koleksi perpustakaan tanpa perlu penelitian lapangan. Penelitian ini berasal dari buku, jurnal nasional atau artikel-artikel dan skripsi terdahulu yang se-Tema dengan penelitian ini mulai dari periode 2020. (Kamal, 2008)

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

UNESCO mendefinisikan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sebagai wadah pendidikan non-formal yang sepenuhnya diselenggarakan dan dikelola oleh komunitas itu sendiri. Lembaga ini didirikan untuk melayani masyarakat, baik di desa maupun di kota, dengan menawarkan berbagai model pembelajaran. Melalui program-program ini, PKBM berupaya mengembangkan keterampilan dan kemampuan warga agar mereka memiliki bekal untuk memperbaiki kualitas hidup.

Adapun program yang terdapat pada PKBM adalah:

1. Pengembangan pelatihan keterampilan

PKBM melaksanakan tahapan perencanaan program pelatihan secara sistematis dan terstruktur. Proses perencanaan diawali dengan analisis kebutuhan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada serta menilai jenis keterampilan dan pelatihan yang diperlukan. Tahap ini memungkinkan lembaga untuk berperan sebagai fasilitator yang tepat dalam menyediakan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pedoman teknis dari Direktorat Jenderal Pendidikan dan Vokasi (DIKSI) dijadikan acuan dalam menyusun tujuan, sumber daya, serta metode pembelajaran. Pelaksanaan pelatihan keterampilan dilakukan dengan memperkenalkan materi kepada peserta didik oleh instruktur pelatihan. Pelatihan ini juga mencakup pengembangan keterampilan berwirausaha. (Wilona et al., 2024)

Dalam konteks mendorong pembelajaran seumur hidup, pendidikan nonformal hadir sebagai layanan yang melengkapi, menambah, atau menggantikan pendidikan formal, berfokus pada membantu anggota masyarakat mencapai potensi penuh melalui penekanan pada perolehan keterampilan praktis, informasi, serta pengembangan sikap profesional dan kepribadian. Salah satu program utama dari pendidikan nonformal adalah pendidikan kesetaraan, yang mencakup Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA), bertujuan untuk menjamin akses pendidikan bagi semua orang dan membantu

mereka menyelesaikan pendidikan serta mengembangkan keterampilan hidup yang dibutuhkan. Dengan memberikan pendidikan akademis dan keterampilan hidup secara fleksibel, pendidikan kesetaraan menjadi strategi penting untuk mengatasi permasalahan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup serta aktualisasi diri warga masyarakat. (Rohmah et al., 2024)

2. Program Keaksaraan

Buta aksara didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang tidak memiliki kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung, serta kesulitan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan adanya program keaksaraan. Secara spesifik, program keaksaraan adalah sebuah program pembelajaran yang berpusat pada masalah nyata yang dihadapi oleh peserta didik dalam keseharian mereka. Karena sifatnya yang berorientasi pada isu-isu kehidupan peserta didik, materi yang diajarkan harus didasarkan pada permasalahan praktis atau kegiatan yang dapat membantu mereka menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang sudah dimiliki. Oleh karena itu, agar program keaksaraan berhasil, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan individual setiap peserta didik, berdasarkan masalah, minat, dan keperluan mereka masing-masing. (Mafullah, 2013)

3. Program Pendidikan Kesetaraan

Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C) diinisiasi sebagai kebijakan afirmatif pemerintah yang dirancang sebagai intervensi struktural guna menanggulangi angka putus sekolah dan mengatasi disparitas akses pendidikan. Program yang dilaksanakan melalui jalur Pendidikan Non-Formal dan Informal (PNFI) ini berfungsi memberikan kesempatan pendidikan kedua bagi individu yang mengalami drop-out. Secara operasional, ia terbagi atas Paket A, B, dan C, yang masing-masing setara dengan jenjang pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA), dengan tujuan utama memfasilitasi perolehan sertifikat kesetaraan.

Implementasi Program Paket Kesetaraan memiliki signifikansi makro dalam konteks pembangunan sosial-ekonomi. Program ini secara strategis ditujukan untuk meningkatkan kapital manusia bagi masyarakat yang mengalami drop-out pendidikan, yang merupakan prasyarat penting untuk daya saing dan peningkatan kesejahteraan. Melalui peningkatan kualifikasi ini, pemerintah berupaya aktif dalam mitigasi kemiskinan struktural dan memfasilitasi mobilitas sosial vertikal, khususnya bagi

kelompok masyarakat yang rentan, sehingga mendukung terciptanya masyarakat yang lebih setara.

Meskipun dirancang sebagai solusi terhadap ketidaksetaraan, efektivitas mekanisme intervensi sosial ini sangat bergantung pada kualitas dan jangkauan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi sistematis dan peningkatan mutu pada program-program bantuan biaya pendidikan yang mendukungnya menjadi krusial. Upaya ini penting untuk memastikan dukungan yang diberikan dapat memotivasi partisipasi berkelanjutan dan menjamin Program Pendidikan Kesetaraan mampu memberikan dampak optimal dalam mencapai tujuan pendidikan yang setara. (Nurson & Sari, 2024)

Berdarkan data dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah total jumlah sekolah dari Pendidikan kesetaraan PKBM berjumlah keseluruhan 25.795 swasta dan negeri. Dengan sekolah terbanyak banyak berada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 1225 untuk paket A, 2071 paket B, dan 2187 paket C, dengan total 5.483. Selanjutnya, sekolah paling sedikit yaitu luar negeri, yang dimana merupakan masyarakat Indonesia yang terdaftar di PKBM Luar negeri yang berjumlah paket A 5 sekolah, paket B 9 sekolah, paket C 8 sekolah, dengan total 22 sekolah. (*Jumlah Program/Layanan Kesetaraan Per Provinsi*, 2025)

A. Teori Struktural Fungsional

Perspektif Struktural Fungsional, atau dikenal juga sebagai fungsionalisme struktural, menyajikan suatu pandangan yang komprehensif mengenai organisasi dan dinamika masyarakat. Teori ini berakar pada paradigma Konsensus, yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari jaringan kelompok yang berinteraksi secara terorganisasi dan teratur. Kelompok-kelompok ini bekerja sama sesuai dengan norma-norma dan teori-teori yang berkembang dalam perjalanan waktu untuk menjaga keseimbangan dan fungsi masyarakat secara keseluruhan. (Wijaya & Nasution, 2023)

Teori ini dikembangkan oleh Talcott Parsons, seorang sosiolog Amerika terkemuka pada abad ke-20. Inti dari teori Struktural Fungsional adalah menekankan pentingnya memahami struktur sosial dan peran fungsi setiap struktur tersebut dalam mempertahankan keteraturan dan keseimbangan sistem sosial. Konsep dasarnya adalah bahwa setiap sistem sosial (seperti masyarakat, organisasi, atau kelompok) tersusun dari berbagai komponen atau bagian yang saling terhubung, dan

masing-masing memiliki fungsi spesifik (Gunawan & Bahari, 2024). Menurut Talcott Parsons, sistem sosial harus memiliki kesinambungan dengan sistem-sistem lain agar mampu bertahan dan strukturnya dapat terus bergerak. Gagasan ini menganalogikan masyarakat seperti organisme biologis, sebuah pandangan yang dipengaruhi oleh pemikiran Herbert Spencer dan Auguste Comte. Dalam analogi ini, Parsons melihat adanya ketergantungan timbal balik antarbagian atau "organ" dalam masyarakat, sama seperti ketergantungan antarorgan dalam tubuh makhluk hidup. (A'yun, 2022)

Teori Struktural-Fungsional berakar pada konsep tatanan sosial, mengasumsikan masyarakat cenderung statis atau seimbang, di mana setiap elemen berfungsi untuk mempertahankan stabilitas. Akar pemikirannya berasal dari Emile Durkheim dan antropolog kontemporer (Nugroho, 2021). Teori Struktural Fungsionalisme, yang dipelopori oleh Talcott Parsons dan dikembangkan oleh muridnya, Robert K. Merton, mengkaji masyarakat sebagai sistem sosial yang mencari keteraturan dan keseimbangan melalui bagian-bagian yang saling berfungsi (Pereira, 2020). Teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons selain dipengaruhi oleh Emile Durkheim juga dipengaruhi oleh Max Weber, Sigmund Freud, dan Vilfredo Pareto. Dari semua tokoh tersebut, Parsons paling banyak mengambil pengaruh dari Pareto, khususnya gagasan mengenai masyarakat yang dipandang sebagai suatu sistem hubungan (Aprilia & Juniarti, 2022). Fokus utama teori fungsionalisme struktural Parsons adalah pada struktur masyarakat dan bagaimana berbagai struktur tersebut saling berhubungan dan saling mendukung untuk mencapai keseimbangan dinamis dalam sistem sosial.

Sebagai salah satu tokoh utamanya, Talcott Parsons, berfokus pada aspek saling ketergantungan (interdependensi) dan keseimbangan dalam sistem sosial. Ia berpendapat bahwa sistem adalah entitas dengan bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan; perubahan pada satu bagian akan memengaruhi bagian lain, dengan tujuan akhir mencapai dan mempertahankan keseimbangan sistem. Parsons menganalisis tindakan sosial melalui kerangka alat-tujuan (*means-ends framework*), yang meliputi tiga elemen: tindakan harus bertujuan, melibatkan alat dalam situasi tertentu, dan diatur secara normatif (berdasarkan norma) dalam pemilihan alat dan tujuan. Selain itu, Parsons menekankan bahwa tindakan individu juga

didorong oleh komitmen nilai nonekonomis (motif yang melampaui sekadar keuntungan atau kesenangan materi), bukan hanya sekadar evaluasi rasional terhadap alat. (Wijaya & Nasution, 2023)

Dalam pendidikan terdapat penanaman karakter yang dilakukan di sekolah dasar dengan menggunakan pendekatan teori struktural fungsional Talcott Parsons, khususnya melalui konsep imperatif AGIL (Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latency). Fungsi ini berperan sebagai mekanisme penyesuaian diri (adaptasi) sistem. (Sulistiawati & Nasution, 2022)

1. Goal attainment, Sebuah sistem wajib mencapai tujuannya (Goal Attainment). Agar tujuan utama tersebut terealisasi, diperlukan keterlibatan aktif dari setiap individu yang menjadi bagian dari sistem.
2. Integration, Sebuah sistem harus mampu mengatur dan mengelola seluruh hubungan timbal balik yang terjadi di antara komponen-komponen pembentuknya.
3. Latency, suatu sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki

Berdasarkan asumsi-asumsi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem sosial pada dasarnya adalah sistem tindakan-tindakan manusia.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, setiap struktur dalam sistem sosial harus bersifat fungsional atau memberikan kontribusi positif terhadap struktur lainnya. Struktur yang tidak lagi fungsional atau tidak relevan akan hilang dengan sendirinya. Oleh karena itu, semua struktur yang ada di masyarakat dianggap bermanfaat bagi kelangsungan masyarakat. Jika terjadi ketidaksesuaian atau ketegangan, sistem akan berupaya menemukan cara penyelesaiannya agar keseimbangan dalam masyarakat tetap terjaga. (Nikmah, 2025)

Fenomena dan realitas pendidikan merupakan entitas yang inheren dalam sistem sosial. Secara spesifik, pendidikan dituntut untuk menginternalisasikan nilai-nilai sosial dengan membangun relasi yang interaktif dan melakukan internalisasi nilai-nilai tersebut secara berkelanjutan. Sementara itu, implementasi nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara inherent mengandung dimensi-dimensi edukatif. Klasifikasi serta stratifikasi yang hadir dalam tubuh masyarakat memiliki peran, bentuk, dan fungsi tersendiri,

di mana konsep-konsep inilah yang mendasari teori struktural-fungsional. Teori ini bercirikan integrasi ekstrem dalam setiap peristiwa dalam suatu tatanan fungsional bagi masyarakat, sehingga berimplikasi pada terbentuknya kohesivitas pada setiap struktur dalam ranah fungsional masyarakat. Di era globalisasi kontemporer, pendidikan juga memainkan peran signifikan dalam membentuk struktur dan stratifikasi sosial. Berdasarkan teori struktural fungsional, program pendidikan kesetaraan pada PKBM diposisikan sebagai sebuah subsistem yang menjalankan fungsi manifes guna memelihara tatanan sosial. Pendidikan tidak hanya bertempat di gedung sekolah saja. Ataupun pendidikan tidak hanya berfokus kepada murid atau peserta didik yang hanya memiliki seragam atau atribut secara simbolis saja. Sebagai sebuah institusi sosial Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki fungsi menjalankan pendidikan kepada masyarakat. (Kamil, 2009)

Peran sentralnya adalah menutupi celah struktural dalam sistem pendidikan nasional melalui penyediaan akses pendidikan formal alternatif bagi kelompok yang mengalami putus sekolah atau tidak memiliki akses ke jalur pendidikan formal. Dengan demikian, PKBM berfungsi sebagai mekanisme adaptasi sistem sosial untuk mengatasi disfungsi yang ditimbulkan oleh keterbatasan jangkauan pendidikan konvensional. Eksistensi PKBM berperan dalam menstabilkan potensi konflik sosial akibat ketimpangan pendidikan, sekaligus menjamin terpenuhinya kebutuhan pendidikan demi terpeliharanya keseimbangan sistem.

Untuk memahami fungsi PKBM, kita bisa menggunakan kerangka AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency/Pattern Maintenance) yang dikembangkan oleh Parsons (George, 2012). Berdasarkan kerangka AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latent Pattern Maintenance) yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, Program Kesetaraan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat dipahami sebagai sebuah subsistem pendidikan yang menjalankan fungsi-fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan sistem sosial. Skema AGIL menegaskan bahwa program ini tidak hanya sekadar alternatif pendidikan, melainkan sebuah mekanisme fungsional yang turut serta dalam memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Berikut program kesetaraan PKBM dalam teori struktural fungsional menurut Talcott Parsons

1. Adaptation (Adaptasi)

Aspek adaptasi merepresentasikan kapasitas suatu sistem dalam merespons

dinamika lingkungan eksternal serta mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya. Dalam konteks ini, program kesetaraan PKBM berperan sebagai instrumen penyesuaian yang signifikan bagi keberfungsian sistem sosial. PKBM melakukan penyesuaian dengan mengisi celah akses pendidikan yang tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh institusi pendidikan konvensional, khususnya bagi populasi rentan seperti remaja putus sekolah, angkatan kerja tanpa basic pendidikan, maupun komunitas di wilayah terpencil. Program ini memberdayakan potensi sumber daya manusia yang sebelumnya kurang tersentuh dengan memberikan sertifikasi kesetaraan. Transformasi ini mengonversi individu yang belum tersertifikasi menjadi calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi dasar yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. PKBM menunjukkan fleksibilitasnya dengan memberdayakan berbagai sumber daya lokal, meliputi pemanfaatan tenaga pengajar dari komunitas setempat, optimalisasi ruang publik sebagai sarana pembelajaran, serta pengembangan skema pendanaan mandiri melalui kerjasama dengan masyarakat dan pelaku industri.

2. Goal Attainment (Pencapaian Tujuan)

Pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pendidikan non formal pasti akan mempunyai tujuan yang dicapai. Salah satunya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Hal ini mengenai tujuan di selenggarakannya PKBM salah satunya untuk memberikan daya guna kepada masyarakat yang sebelumnya tidak berdaya. Tidak berdaya diartikan individu yang mempunyai kekurangan dalam hal ketrampilan atau pengetahuan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor ekonomi hingga faktor keluarga. Dalam hal ini dibutuhkan kerja sama dari seluruh pengurus yang ada di PKBM, mulai dari pengelola, staff pengajar hingga warga belajar. Tujuan yang ingin dicapai bisa terwujud dengan adanya kerja sama dari seluruh elemen yang ada. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa PKBM tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada kerja sama yang baik. Dan setiap yang bertugas di PKBM mempunyai jalan perannya masing masing

Pencapaian tujuan merepresentasikan kompetensi sistem dalam merumuskan dan merealisasikan sasaran strategisnya. Program Kesetaraan PKBM dirancang dengan struktur tujuan multidimensional yang bersifat hierarkis. Pada tingkat makro, program ini mengarah pada

penurunan statistik putus sekolah dan angka buta aksara, peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penyediaan cadangan tenaga kerja terampil level menengah yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada tingkat kelembagaan, PKBM bertujuan untuk menyediakan layanan pendidikan nonformal yang bermutu dan inklusif bagi berbagai segmen masyarakat, dengan output lulusan yang memiliki kompetensi dan pengakuan setara dengan pendidikan formal. Realisasi tujuan-tujuan tersebut diaktualisasikan melalui penyelenggaraan kurikulum terstruktur dalam Program Paket A, B, dan C yang paralel dengan jenjang SD, SMP, dan SMA, didukung mekanisme evaluasi melalui ujian kesetaraan yang difasilitasi pemerintah. Mekanisme ini menjamin terealisasinya misi konstitusional sistem pendidikan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kanal pendidikan alternatif.

3. Integration (Integrasi)

Integrasi merepresentasikan mekanisme penyelarasan dan penguatan solidaritas antar berbagai komponen dalam sistem. Program Kesetaraan PKBM berfungsi sebagai instrumen pemersatu masyarakat dan wahana inklusivitas sosial. Program ini berperan dalam mengintegrasikan kelompok termarjinalkan (seperti putus sekolah dan kaum muda pekerja) ke dalam struktur masyarakat melalui pengakuan kesetaraan ijazah. Mekanisme ini berfungsi sebagai pencegah meluasnya eksklusi sosial. PKBM menciptakan ruang integratif dimana peserta didik dari beragam latar belakang terlibat dalam komunitas pembelajaran. Melalui interaksi ini, terjadi internalisasi nilai-nilai kemasyarakatan, norma sosial, dan kesadaran kewarganegaraan yang memperkuat kohesivitas sosial. Keberadaan PKBM sering berkembang menjadi simpul aktivitas masyarakat yang menghubungkan berbagai stakeholder, mencakup pemerintah lokal, sektor usaha, dan organisasi masyarakat. Jaringan sinergis ini berkontribusi pada penguatan integrasi di tingkat komunitas.

4. Latency (Pemeliharaan)

Pemeliharaan pola laten berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas sistem melalui reproduksi nilai-nilai budaya dan sustainabilitas motivasi individu. PKBM menjalankan peran kultural yang fundamental dalam mempertahankan kontinuitas tatanan sosial. PKBM merevitalisasi semangat belajar dan kontribusi sosial warga belajar melalui mekanisme "kesempatan kedua", mentransformasi pengalaman kegagalan sebelumnya menjadi modal psikologis untuk

berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Melalui proses edukasi, PKBM tidak hanya mentransmisikan ilmu pengetahuan namun juga mereproduksi sistem nilai sosial seperti integritas, etos kerja, akuntabilitas, dan solidaritas komunal, sehingga memastikan keberlanjutan warisan budaya kepada generasi penerus di luar jalur formal. Desain pembelajaran yang adaptif namun terstruktur dalam PKBM menumbuhkan internalisasi pola perilaku teratur seperti kedisiplinan, manajemen waktu, dan sense of responsibility yang menjadi fondasi bagi terpeliharanya stabilitas masyarakat.

Salah satu upaya yang diselenggarakan agar partisipasi terhadap PKBM di setiap tahun mengalami peningkatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberangsungan lembaga sosial memang sering mengalami pasang surut, baik itu dalam hal partisipasi ataupun kelembagaanya. Maka dari itu perlu dilakukan pemeliharaan agar tetap langgeng. Berdasarkan penjelasan dari program PKBM dapat ditarik kesimpulan bahwa PKBM telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk menjaga dan melestarikan keberlangsungan berbagai program yang diselenggarakan PKBM agar tetap bisa memberi makna bagi masyarakat dan sekitarnya. Lembaga sosial memang sering mangalami ketidakpastian dalam hal partisipasi, untuk itu strategi yang dilakukan PKBM rutin mengadakan sosialisai program terhadap masyarakat luas, dan menjelaskan manfaat dari masing-masing program, serta harus selalu memberikan inovasi inovasi baru agar manfaat dari PKBM dapat di rasakan oleh semua kalangan, mulai dari anak usia dini hingga lansia.

Peran orang tua dalam menunjang keberhasilan belajar anak diwujudkan melalui beberapa cara: pertama, sebagai fasilitator dengan menyediakan fasilitas belajar seperti meja belajar, buku, dan alat tulis, yang juga meningkatkan semangat belajar anak ; kedua, penanaman sikap disiplin, seperti menentukan jam tidur, jam belajar, dan jam bermain, yang membantu anak terbiasa melakukan sesuatu secara teratur dan menumbuhkan rasa tanggung jawab ; ketiga, sebagai motivator dengan memberikan dukungan (support), semangat, penghargaan, dan nasihat, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempertahankan atau meningkatkan prestasi ; dan keempat, penanaman sikap kemandirian dalam belajar, sehingga anak memiliki inisiatif sendiri untuk belajar dan menjadi peka terhadap tanggung jawabnya sebagai siswa. Selain itu, keluarga besar (kerabat) juga bertanggung jawab dalam perkembangan anak, termasuk dalam hal

membimbing anak belajar, terutama pada keluarga pekerja. Penelitian ini juga membahas peran orang tua dalam mengontrol penggunaan *handphone* pada anak karena dampak negatifnya terhadap konsentrasi dan kemampuan belajar. (Labungasa et al., 2023)

E. Kesimpulan

Peran keluarga, terutama orang tua, sangat krusial dalam meningkatkan prestasi belajar anak sekolah dasar. Peran tersebut diimplementasikan melalui beberapa fungsi kunci sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana belajar yang memadai , menanamkan sikap disiplin (seperti mengatur jam tidur dan belajar) untuk membentuk karakter dan tanggung jawab anak , serta menjadi motivator yang memberikan *support*, semangat, penghargaan, dan nasihat untuk mempertahankan atau meningkatkan prestasi. Selain itu, orang tua juga berperan dalam menanamkan sikap kemandirian belajar agar anak memiliki inisiatif sendiri. Bagi keluarga pekerja, keluarga besar (kerabat) ikut bertanggung jawab dalam membimbing anak belajar. Orang tua juga perlu mengontrol penggunaan *handphone* karena dampaknya yang negatif terhadap konsentrasi dan kemampuan belajar anak.

Dalam kerangka Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, peran keluarga ini dapat dianalisis menggunakan konsep AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency). Adaptation (Adaptasi) terlihat ketika orang tua, khususnya ibu, beradaptasi dengan perkembangan anak, misalnya membiarkan anak melakukan yang disukai terlebih dahulu sebelum belajar, alih-alih memaksa. Goal Attainment (Pencapaian Tujuan) diwujudkan melalui penanaman sikap disiplin oleh orang tua (seperti disiplin waktu), yang merupakan cara untuk membentuk karakter baik dan mencapai tujuan menjadikan anak berprestasi. Integration (Integrasi) terlihat dalam pemberian kesempatan oleh orang tua kepada anak untuk mengutarakan pendapat, yang menunjukkan koordinasi dan pemeliharaan hubungan dalam sistem keluarga. Terakhir, Latency (Pemeliharaan Pola) dicapai melalui upaya seperti ayah membimbing anak belajar, ibu memberi nasihat, dan orang tua memberikan penghargaan atas pencapaian anak, yang berfungsi memelihara pola dan motivasi dalam sistem sosial terkecil (keluarga).

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (2020). Sekretariat Jenderal MPR RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. Nomor 20 (2003). https://peraturan.bpk.go.id

Buku :

George, R. (2012). *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kamal, M. (2008). *Model Pengembangan PKBM*. Bandung: Alfabeta.

Kamil, M. (2009). Pendidikan Nonformal Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Di Indonesia Dari Komunkan Di Jepang). In *Bandung: Alfabeta*. Bandung: Alfabeta.

Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal :

A'yun, Q. (2022). Struktural Fungsional Sistem Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisa Sosiologi*, *11*(2), 215–228. https://doi.org/10.20961/jas.v11i2.58113

Aprilia, S., & Juniarti, U. (2022). Implementasi Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons Dalam Upaya Melestarikan Tradisi Islam Melayu Nganggung Dulang Di Bangka Belitung. *JURNAL DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi Islam*, *1*(01), 18–37. https://doi.org/10.32923/dla.v1i01.2328

George, R. (2012). *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gunawan, I., & Bahari, Y. (2024). Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur). *Journal Of Human And Education (JAHE)*, *4*(4), 609–618. https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1190

Jumlah Program/Layanan Kesetaraan Per Provinsi. (2025). Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah. https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/pendidikan/program/kesetaraan

Kamal, M. (2008). *Model Pengembangan PKBM*. Bandung: Alfabeta.

Kamil, M. (2009). Pendidikan Nonformal Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Di Indonesia Dari Komunkan Di Jepang). In *Bandung: Alfabeta*. Bandung: Alfabeta.

Labungasa, A. B., Paat, C., & Tumengkol, S. (2023). Peran Keluarga Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak Sekolah Dasar di Lingkungan Perumahan Mountain View Residence

Kelurahan Paniki Bawah Kota Manado. *Ilmiah Society*, *3*(2), 1–8.

Mafullah, S. (2013). *JURNAL Oleh : UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA*. 1–11.

Nikmah, M. (2025). *SCHOOL ANALYSIS IS SYSTEM SOCIAL PERSPECTIVE BY TALCOTT PARSONS Maslahatun Nikmah 1 , 1*. *2*, 24–35.

Nugroho, A. C. (2021). Teori utama sosiologi (fungsionalisme struktural, teori konflik, interaksi simbolik). *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, *2*(2), 185–194. https://portal-ilmu.com/teori-utama-sosiologi/

Nurson, N. L., & Sari, W. J. (2024). Program Paket Kesetaraan Upaya Mengatasi Angka Putus Sekolah. *Journal of Global and Multidisciplinary*, *2*(1), 838–844. https://journal.institercom-edu.org/index.php/multipleINSTITERCOMPUBLISHERhttps://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple

Pereira, S. da C. (2020). *Rangkuman_Teori_Struktural_Fungsionalism*.

Rohmah, S. S., Ridwan, R., & Wahyuni, S. (2024). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pendidikan Kesetaraan Paket C pada PKBM Kedondong persoalannya . Pembatasan ini biasanya disebabkan oleh sejumlah faktor , seperti perumahan. *Realisasi : Ilmu Pendidikan, Seni Rupa Dan Desain*, *1*(4), 218–230.

Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sulistiawati, A., & Nasution, K. (2022). Upaya Penanaman Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons. *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, *4*(1), 24–33. https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikandasar.v4i1.1839

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (2020). Sekretariat Jenderal MPR RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. Nomor 20 (2003). https://peraturan.bpk.go.id

Wijaya, K. C., & Nasution, K. (2023). Pemahaman Terhadap Struktural Fungsional Dalam Konteks Pendidikan Islam. *Annual International Conference on Education Research*, *00*(00), 1–13. https://doi.org/10.14421/IJBER.tahun.volumeno

Wilona, D. F., Darmawan, D., & Ganiadi, M. (2024). Manajemen Pelatihan Sablon Digital di PKBM Maju Bersama Pandeglang. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, *9*(2), 679–684. https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2140